

# DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENYELESIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN TAHUN 2012 - 2015

**Tio Rizky**

Email: [Tiorizky31@gmail.com](mailto:Tiorizky31@gmail.com)

**Pembimbing:** Drs .Syafri Harto, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau  
Kampus bina widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*This research tries to explain how the diplomacy conducted by Indonesia in the South China Sea dispute resolution. Where this dispute involves many countries both within the ASEAN region and outside the ASEAN region so it is feared can disrupt the stability in the region, and impact on the interests of Indonesia.*

*This research uses the perspective of neorealism, neorealism is a new form of realism, neorealism more emphasis on cooperation and role of institutions - both government and non-government institutions in international relations. This research uses diplomacy theory, soft diplomacy, and preventive diplomacy.*

*The South China Sea dispute has been going on for more than twenty years, some ways of settling have been tried both between disputed countries and international organizations such as ASEAN, but still not effective. Indonesia as an ASEAN member country and a country bordering on the South China Sea who is also a natural leader within the ASEAN region realizes that a protracted dispute will have a devastating impact on the region and the interests of Indonesia itself. Therefore, Indonesia took part in the process of settling South China Sea dispute, this can be seen from the diplomacy conducted by Indonesia, namely through first track diplomacy and second track diplomacy.*

**Keywords:** *South China Sea, Dispute, Diplomacy Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu contoh sengketa wilayah perairan dapat kita lihat pada permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Sengketa ini merupakan salah satu Sengketa yang sangat sulit penyelesaiannya di wilayah Asia Tenggara. Faktor pemicu sulitnya penyelesaiannya sengketa ini adalah

banyaknya pihak yang terlibat dalam Sengketa ini. Antara lain, Brunei Darusalam, Filipina, Malaysia, Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam. Para negara klaim mempermasalahakan terkait tumpang tindih klaim teritorial dan penarikan batas laut di wilayah tersebut. Walaupun saat ini

sengketa di Laut Cina Selatan terlihat damai, tapi sampai saat ini sengketa tersebut belum terselesaikan secara tuntas dan hal ini dapat menimbulkan pemicu-pemicu konflik dimasa yang akan datang. Fakta lain juga menunjukkan bahwa lima tahun belakangan ini, ketegangan yang muncul dari para negara klaim menunjukkan kepada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pada dekade sebelumnya.

Pada tahun 1947 Tiongkok mulai memanasakan sengketa di laut Cina Selatan yaitu dengan cara sepihak hampir mengklaim seluruh wilayah laut Cina Selatan. Pada saat itu Tiongkok menerbitkan peta dengan tanda sembilan garis putus – putus di sekiran wilayah Laut Cina Selatan<sup>1</sup>.

Diperkirakan terdapat kandungan minyak bumi di kawasan Laut China Selatan. Estimasi kandungan minyak di kawasan Laut Cina Selatan sebanyak 213 bbl (*billion barrels*)<sup>2</sup>. Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan Laut Cina Selatan juga beragam. Selain sumber daya alam Laut Cina Selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan Laut Cina Selatan sebagai prioritas dalam aktivitas politik luar negerinya. Sebut saja Jepang, 80% impor minyaknya diangkut melalui jalur kawasan Laut Cina Selatan.<sup>3</sup> Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai angka kerjasama perdagangan yang tinggi

<sup>1</sup> Akmal dan Pazli, "Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2009-2014," *Journal of International Society*, Vol.3, No 1, 2016, hal 2

<sup>2</sup> P. Bayu Dewantara, Peran Indonesia dalam menangani Konflik Laut Cina Selatan, diakses dari [www.theglobal-review.com](http://www.theglobal-review.com), pada tanggal 4 Januari 2017 pukul 11.47

<sup>3</sup> *ibid*

dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara setidaknya ada dua hal mengapa kawasan ini menjadi sengketa banyak negara. Pertama, wilayah kawasan Laut Cina Selatan punya potensi ekonomi terutama kandungan minyak dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional. Kedua, negara-negara yang bersengketa sangat membutuhkan minyak untuk kelangsungan industri maupun kelangsungan ekonomi nasionalnya.

Sejak deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan ( *ASEAN Declaration on the South China Sea* ) yang ditandatangani pada tahun 1992, hampir terjadi konfrontasi militer terbuka pada kejadian di Scarborough Shoals di tahun 2012. Kemudian, munculnya Tiongkok sebagai negara adidaya membuat ketegangan semakin meninggi karena Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi dan militer terkuat dibanding negara klaim yang lain. Selanjutnya munculnya Amerika dengan kebijakan *rebalancing* dan kekuatan besar lainnya seperti Jepang dan India turut memperkeruh suasana karena semakin banyaknya kepentingan yang terlibat dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan. Untuk menghindari situasi semakin memburuk dikemudian hari dibutuhkan suatu cara penyelesaian masalah secara kongkrit agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan.

Penyelesaian masalah melalui jalan damai telah di upayakan untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan ini, namun belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti yang dilakukan pada *first track diplomacy*, melalui pendekatan regional oleh ASEAN telah disepakati Deklarasi Tata Prilaku Pihak-Pihak di Laut Cina Selatan ( *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* ) yang

dirasa sudah cukup berhasil dalam mengelola sengketa, namun pendekatan ini belum dapat mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan<sup>4</sup>. Salah satu kesulitan yang ditemukan dalam penanganan sengketa ini melalui jalur regional ASEAN adalah perpecahan antara negara yang sebagian mengiginkan peran ASEAN dalam penyelesaian konflik dan sebagian negara lagi mengiginkan penyelesaian secara bilateral seperti yang digagas oleh Tiongkok. Tradisi nonintervensi yang menjadi tradisi ASEAN juga dirasa tidak cukup efektif dalam penyelesaian masalah ini.

Pada penyelesaian secara bilateral yang digagas oleh Tiongkok, cara ini hanya efektif untuk mendapatkan kepentingan jangka pendek Tiongkok saja dan pada akhirnya tetap akan menimbulkan ancaman di masa mendatang. Karena cara bilateral ini berhasil mencegah negara-negara di ASEAN untuk bersatu melawan Tiongkok. Namun, perpecahan ini menimbulkan masalah baru didalam kawasan seperti ketidakstabilan integrasi ekonomi regional juga masalah kerjasama keamanan antar negara di ASEAN. Untuk itu penyelesaian secara bilateralpun masih terdapat beberapa kekurangan. Apalagi jika kita lihat potensi sengketa Laut Cina Selatan ini masih bisa melebar jika Tiongkok menganggap *nine-dashed line* sebagai sebagai sebuah garis yang berkelanjutan meliputi klaimnya di kedua wilayah baik teritorial maupun laut dalamnya, maka akan terjadi tumpang tindih dengan batas-batas maritim Indonesia. Hal ini membuat Tiongkok harus berhadapan juga dengan Indonesia yang merupakan

negara terbesar yang ada di kawasan ASEAN, dan menjadikan penyelesaian sengketa ini semakin rumit.

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan tantangan bagi stabilitas kawasan termasuk Indonesia. Lokasi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan merupakan salah satu faktor mengapa Sengketa ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang bukan negara klaim. Isu sengketa ini juga menjadi batu sandungan bagi ASEAN. Maka dari itu Indonesia, baik dalam posisi negara yang memperjuangkan kepentingannya maupun sebagai pemimpin alami ASEAN,<sup>5</sup> harus ikut membantu menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.<sup>6</sup>

Melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada pada *first track diplomacy* yang dilakukan oleh ASEAN dan Tiongkok seperti yang kita lihat diatas, maka jika kita merujuk pada teori *multi track diplomacy* rasanya akan lebih efektif jika kita menggunakan cara-cara lain di semua level diplomasi yang ada. Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan memberdayakan *second track diplomacy* untuk mendukung dan melengkapi kekurangan yang ada pada *first track diplomacy*. Kegiatan workshop yang digagas oleh Indonesia yakni "*Managing Potential Conflicts in the South China Sea*" merupakan salah satu contoh *second track diplomasi* yang berpotensi mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan pada *firs track diplomacy*.

Workshop ini diyakini penting untuk dilakukan karna melalui jalur ini penyelesaian sengketa dapat dilakukan

---

<sup>4</sup>Alman Helvas Ali, "Dinamika di Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Indonesia, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/dinamika-di-laut-cina-selatan-dan-implikasinya-terhadap-indonesia/>, pada tanggal 31 Januari 2017 Pukul 10.10 Wib

---

<sup>5</sup>Indonesia sebagai negara terbesar, dan dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam dunia Internasional sehingga dianggap sebagai pemimpin alami di ASEAN

<sup>6</sup>Sandy Nur Ikfal Raharjo, "Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan". Hal 1

dengan cara yang lebih bersahabat. *Second track diplomacy* yang bersifat informal memberikan kesempatan bagi para pihak bersengketa untuk dapat hadir dalam kapasitas personal dan mengemukakan pendapatnya secara lebih terbuka tanpa adanya tekanan seperti yang terjadi pada jalur *first track diplomacy*. Struktur peserta yang sebagian terdiri dari pejabat negara juga memudahkan ide-ide yang muncul untuk dapat disalurkan nantinya kepada instansi terkait. Selain itu Indonesia sebagai negara yang menginisiasikan terselenggarakannya workshop ini merupakan negara yang dianggap netral, karena Indonesia bukanlah negara yang terlibat sengketa tersebut. Indonesia juga dikenal sebagai pemimpin normative di kawasan yang sering dipercaya untuk menegahi sengketa.

Indonesia tidak hanya merupakan actor kunci di balik berbagai norma ASEAN Waydan pembangunan ASEAN seperti pembentukan ASEAN *Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*, tetapi juga merupakan mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional, seperti konflik Thailand – Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar<sup>7</sup>.

Tidak hanya itu, dibawah arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia semakin aktif untuk menyuarakan perdamaian ini sesuai dengan slogan Indonesia yang berbunyi *A milllion friends and zero enemies*, dimana Indonesia mencoba merubah potensi konflik yang ada menjadi sebuah bentuk kerjasama dan ini diwujudkan pada AMM ke- 45 di Kambodja dimana Indonesia melakukan “*shuttle diplomacy*” dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan setelah kegagalan ASEAN untuk mengeluarkan komunike bersama pada isu Laut Cina Selatan dalam ASEAN

Ministerial Meeting yang ke-45 pada tahun 2012.

Atas inisiatif inilah negara-negara ASEAN dapat bersepakat dalam posisinya terkait sengketa seperti tercermin dalam “*Six-Point Principles on the South China Sea*”. Oleh karena itu, Indonesia merupakan pihak yang dapat diperhitungkan untuk mendorong penyelesaian damai berkelanjutan di laut Cina Selatan.

Dari kurun waktu 2012 – 2015 Indonesia terus berupaya baik dalam forum bilateral, multilateral, regional kawasan bahkan Internasional untuk terwujudnya penyelesaian kasus sengketa Laut Cina Selatan ini, Indonesia juga masih terus melakukan workshop pada setiap tahunnya sebagai wujud dari diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Atas usaha ini pula dinamika sengketa dapat diredam sembari mencari cara penyelesaian yang kongkrit atas sengketa ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa *study literature* yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, dengan pertimbangan pengumpulan data dalam penelitian ini secara kualitatif didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi buku, jural yang relevan, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif. Peneliti melakukan penelitian dimulai dari premis-premis khusus yang nantinya akan menggambarkan fenomena yang terjadi secara keseluruhan (induktif).

---

<sup>7</sup>BPPK KEMENLU, Laporan Akhir Riset, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM 2015, hal 6

Dalam mencari bahan dan data peneliti menggunakan metode studi pustaka atau *library Research*. Peneliti menggunakan buku, jurnal, media cetak, dan media elektronik sebagai sumber untuk mendukung

## PEMBAHASAN

Laut Cina Selatan Merupakan laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*) yang luasnya meliputi tiga setengah juta kilometer persegi, dan 90 persen diantaranya dilingkasi oleh daratan dan pulau-pulau. Seperdua dari negara-negara tepinya merupakan negara pulau atau kepulauan, seperti Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Seperdua lainnya merupakan bagian dari benua Asia, yakni RRT, Hong Kong, Macau, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, sebagai negara tidak berpantai (*Land-locked state*) Laos juga dianggap berhak memanfaatkan kawasan Laut Cina Selatan berdasarkan konvensi hukum laut tahun 1982.

Laut Cina Selatan dianggap sebagai sebuah kawasan yang penting karena mempunyai aspek strategis yang bisa mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung kawasan atau negara-negara yang ada disekitarnya. Ada dua aspek yang menjadikan Laut Cina Selatan sangat penting bagi negara-negara tersebut, antara lain:

1. Letak Strategis. Secara geografis Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRT, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina). Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRT. Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang penting karena posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan Samudera

hasil penelitian. Karena beberapa keterbatasan yang dialami peneliti, maka sebagian besar data yang didapat bersumber dari internet.

Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah menjadikan Laut Cina Selatan sebagai rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melalui Laut Cina Selatan.

2. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang terkandung dalam laut Cina Selatan telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara negara RRT dengan sebagian negara – negara anggota ASEAN yang berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Menurut data dari Kementerian Geologi dan Sumber daya Mineral RRT, diperkirakan bahwa wilayah Kepulauan Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam sebesar 17,7 milyar ton, atau dengan kata lain lebih besar dari cadangan yang dimiliki oleh Kuwait (13 milyar ton).<sup>8</sup>

Negara – negara di wilayah yang berbatasan dengan laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Tiongkok termasuk Macau dan Hongkong, Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai- sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong). Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.<sup>9</sup>

Dengan arti strategis dan ekonomis yang demikian, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik. Sebuah perairan dengan potensi kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting

<sup>8</sup>Karmin Suharna, 2012, Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi ketahanan Nasional, Majalah Tannas edisi 94, hlm.35. Jakarta

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm 21

sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat Laut Cina Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks Regional dan Internasional. Selain konflik antar sesama negara – negara Asia diatas, sengketa ini jug memancing campur tangan Amerika Serikat yang merasa perairan Laut Cina Selatan perlu dijaga stabilitas keamanannya.

Awal mula memanasnya sengketa Laut Cina Selatan ialah ketika Tiongkok pertama kali yaitu pada tahun 1947 mengeluarkan peta yang memasukan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Tiongkok mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut. Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara – negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut Cina Selatan yang kebanyakan merupakan negara anggota ASEAN. Adapaun negara-negara tersebut yaitu, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina dan Malaysia.

Sengketa Laut Cina Selatan awalnya terjadi pada tahun 1974 ketika Tiongkok menginvansi kepulauan Paracel ( pulau yang di klaim Vietnam). Pada tahun 1979, Tiongkok dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam. Pada tahun 1992, 1995 dan 1997, bersama dengan Filipina, Vietnam menganggap Kepulauan Spratly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Dengan klaim tersebut maka eskalasi konflik di Laut Cina Selatan kian meningkat.

Adanya konfrontasi Tiongkok – Vietnam ketika terjadi eksplorasi minyak dalam wilayah perairan Internasional tahun 1994. Pada tahun 1995, Taiwan menembak kapal penyuplai Vietnam. Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata, antara Tiongkok dan Filipina. Pada tahun 1998 Filipina menembak

kapal nelayan Vietnam. Tahun 2000 tentara Filipina menembaki nelayan Tiongkok. Tahun 2001 tentara Vietnam melakukan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengelilingi Pulau Spratly.<sup>10</sup>

Secara historis, Sengketa Laut Cina Selatan sudah terjadi lebih dari 25 tahun lamanya sejak 1974 hingga 2016. Namun ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan sesuatu kekhawatiran baru di dalam kawasan dalam segi keamanan dan ketahanan. Titik sengketa Laut Cina Selatan adalah Kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan Pulau Spratly dan kepulauan Paracel yang mempunyai riwayat yang panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak lebih kurang 1.100 Km dari pelabuhan Yu Lin ( Pulau Hainan, Tiongkok ) dan 500 Km dari pantai Kalimantan Bagian Utara. Inilah yang mengakibatkan perselisihan antar negara – negara yang bersengketa.

Jika diamati, kepentingan – kepentingan pihak yang bersengketa tidak murni hanya didasarkan pada kedaulatan semata untuk menguasai gugusan pulau yang ada di Laut Cina Selatan, tetapi lebih kepada sumber daya alam yang terkandung didalam gugusan pulau dan didalam laut Cina Selatan. Sumber daya alam seperti minyak bumi, mineral, gas dan ikan sanagat potensial jumlahnya didalam laut yang di sengketakan ini.<sup>11</sup> Tidak hanya itu, laut Cina Selatan juga merupakan jalur perdagangan yang sangat penting di dunia. Untuk itu tidak heran kalau wilayah ini menjadi perebutan oleh beberapa pihak.

---

<sup>10</sup> [www.eastasiaforum.org](http://www.eastasiaforum.org), David Arase, Tiongkok's Militant Tactics in the South Tiongkok Sea, East Asia Forum, diakses tanggal 25 Maret 2017

<sup>11</sup> [www.ejournal.hi.fisip.unmul.com](http://www.ejournal.hi.fisip.unmul.com) Analisis Kasus Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Prosedur Diplomatik, diakses tanggal 28 Maret 2017, pukul 23.07 Wib

Banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa Laut Cina Selatan ini membuat sengketa ini sulit unruk diselesaikan dan bahkan sering bereskalasi menjadi ketegangan antar negara. Kepentingan para pihak yang tidak hanya berkaitan dengan aspek terhadap sumber daya strategis di wilayah tersebut tetapi juga inti dari sebuah negara, yaitu kedaulatan dan integritas wilayah, membuat negara selalu menunjukkan kesiapan militernya untuk selalu mengamankan wilayahnya. Sebagai contoh, Tabel dibawah ini menunjukkan bagaimana negara – negara klaim menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan klaimnya di LCS.

Terlebih jika isu kedaulatan tersebut juga menjadi isu keamanan rezim yang berkuasa dikarenakan isu yang berhubungan dengan kedaulatan suatu negara juga sering menyulut sentimen nasionalisme masyarakat dalam negeri. Hal ini ditambah dengan perubahan konteks keamanan internasional yang mengancam suatu negara, seperti adanya persaingan kekuatan ataupun peningkatan kekuatan leh pihak lain yang bersengketa, merupakan fitur-fitur yang selalu kelihatan setiap terjadi konfrontasi militer di Laut Cina Selatan sejak pecahnya konfrontasi pertama pada tahun 1974 hingga terjadi *stand off* kapal angkatan laut Filipina – Tiongkok pada tahun 2012.

Pada level bilateral telah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh negara – negara yang bersengketa, hal ini merupakan langkah awal agar tercapainya perdamaian antar negara yang bersengketa, selain pada level bilateral penyelesaiannya yang bersifat trilateral dan regional juga sudah di upayakan demi terselesaikannya kasus sengketa ini.

### **Diplomasi Bilateral antara Tiongkok - Vietnam**

Mengingat konfrontasi militer antara Tiongkok dan Vietnam merupakan konfrontasi militer pertama di Laut Cina Selatan yang terjadi pada tahun 1974 dan 1988, diplomasi bilateral antara keduanya pun sudah mulai dilakukan sejak konfrontasi tersebut terjadi. Prinsip dari Deng Xiaoping sebagai perumusan kebijakan Tiongkok menjadikan penyelesaian sengketa antara Tiongkok dan Vietnam mulai menemukan titik terang pada saat itu. Kebijakan Deng Xiaoping yang lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan ekonomi menjadikan arah kebijakan Tiongkok lebih kepada kerja sama yang lebih dapat menjaga stabilitas kawasan dan menguntungkan perdagangan internasionalnya.

Dari hasil kebijakan Deng Xiaoping ini pertumbuhan ekonomi Tiongkok melaju drastis, namun hal sebaliknya terjadi pada Vietnam, hal ini lah yang mendorong Vietnam untuk mengubah kebijakannya terhadap Tiongkok. Perang berkepanjangan dan runtuhnya Uni Soviet merupakan faktor menurunnya perekonomian Vietnam, dan hal ini lah yang membuat Vietnam ingin menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Akhirnya pada tahun 1991 Tiongkok dan Vietnam berhasil menormalisasi hubungan keduanya dengan menyepakati batas wilayah darat melalui *Land Border Treaty* pada tahun 1999, *Agreement on the Waters, Exclusive Economic Zone and Continental Shelves in the Gulf of Tonkin* pada tahun 2000 dan *Agreement on Fishing Cooperation in the gulf of Tonkin* pada tahun 2004.<sup>12</sup>

Namun sangat disayangkan memasuki tahun 2006 diplomasi kooperatif antara keduanya tidak dapat dipertahankan karena terdapat perbedaan konteks antara eskalasi konflik pada periode – periode sebelumnya dengan periode tahun 2006. Tiongkok yang menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang

---

<sup>12</sup>*ibid*

begitu besar mulai bersifat agresif dan mengancam dibandingka sebelumnya, dan Vietnam pun lebih memilih untuk bersifat *balancing* terhadap Tiongkok dan mulai berkerjasama dengan Amerika Serikat. Bahkan Vietnam juga bekerjasama dengan Filipina untuk menghadapi agresifitas dari Tiongkok.

### **Diplomasi Bilateral antara Tiongkok – Filipina**

Sengketa antara Tiongkok dan Filipina juga merupakan sengketa yang terbesar setelah Tiongkok – Vietnam. Sengketa ini di mulai ketika Tiongkok mulai menduduki Mischief Reef, yaitu salah satu daerah yang di klaim oleh Filipina sebagai salah satu wilayah dari negaranya. Merespon hal tersebut Filipina kemudian meminta bantuan kepada ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena Filipina sadar bahwa kekuatan kedua negara tidak berimbang apalagi setelah Filipina memutuskan hubungan militer dengan Amerika Serikat di teluk Subic.<sup>13</sup>

Namun lambatnya proses penyelesaian secara regional membuat Filipina merubah arah diplomasinya ke arah bilateral yang dinilai lebih konfrontatif. Pertama, Filipina merevitalisasi kerjasama pertahananya dengan Amerika Serikat yang telah membaik sejak 11 September 2011. Amerika Serikat sendiri telah merubah kebijakannya yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap sengketa ini menjadi ikut dalam permasalahan sengketa ini apalagi semenjak insiden USS Impeccable. Keikutsertaan Amerika Serikat menjadikan perselisihan antara Tiongkok dan Filipina semakin panas, apalagi setelah muncul pernyataan dari Tiongkok bahwa Laut Cina Selatan merupakan “*Core Interest*” Tiongkok, yang memiliki arti bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang akan di pertahankan

<sup>13</sup> *Ibid*

oleh Tiongkok dengan militer jika memang diperlukan.<sup>14</sup>

### **Diplomasi Trilateral antara Tiongkok – Filipina – Vietnam**

Ketegangan antara Tiongkok – Filipina, dan Tiongkok Vietnam merupakan ketegangan yang paling mencolok dalam kasus sengketa Laut Cina Selatan ini, meskipun demikian ketiga negara ini pernah berhasil melaksanakan diplomasi trilateral bersama dibawah naungan *Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU)* pada tahun 2004 – 2006. Setelah upaya diplomasi yang dilakukan oleh ASEAN pada tahun 1995 pada peristiwa Mischief Reef sengketa di Laut Cina Selatan relatif damai, dalam artian tidak ada masalah yang signifikan antara negara – negara yang bersengketa. Pada periode ini juga, hubungan antara Tiongkok dan Filipina juga semakin harmonis dengan terpilihnya Gloria Macapagal Aroyo sebagai presiden baru Filipina pada saat itu. Kebijakan Gloria yang lebih kooperatif menjadi alasan mengapa hubungan keduanya menjadi harmonis. Dibawah pemerintahanya Filipina dan Tiongkok berhasil menyepakati kerjasama studi – studi seismik di Laut Cina Selatan di bawah payung JMSU untuk mendapatkan daerah – daerah untuk eksplorasi minyak dan gas bumi. Kerjasama ini disepakati saat kunjungan presiden Aroyo ke Beijing pada 1 – 3 September 2004 dan berlaku untuk waktu tiga tahun. Pihak yang diberikan kepercayaan dalam kerja sama ini adalah *Philippine National Oil Corporation (PNOC)* dari pihak Filipina dan *China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)* dari pihak

<sup>14</sup> Januari, Diplomasi Filipina, Januariophilippines Weblog,, Jakarta, 2012, diakses dari <https://Januariophilippines.wordpress.com> pada tanggal 13 Mei 2017 pukul 22.30

Tiongkok.<sup>15</sup>Selanjutnya Vietnam sebagai negara yang juga tergabung dalam JMSU dan negara yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan juga bergabung dalam kerjasama ini.

### Diplomasi Regional ASEAN

Melihat kondisi ketegangan yang ada, ASEAN sebagai organisasi internasional yang menaungi negara – negara di kawasan Asia Tenggara, mulai bertindak dan ikut turun tangan menanggapi persoalan yang terjadi di Laut Cina Selatan. Hal ini disebabkan karena jika terjadi konflik terbuka maka negara – negara yang tidak terlibat sengketa seperti Indonesia, Laos, Singapura, Kamboja, Myanmar dan Thailand akan berada dalam posisi yang sulit.

Sesuai dengan tujuan awal dibentuknya ASEAN yang tertera dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*) merupakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam lingkup Asia Tenggara yang melibatkan pihak ketiga apabila terjadi konflik,<sup>16</sup> dan ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976 yang terdapat paling tidak empat norma dan prinsip yang melandasi kehidupan ASEAN yakni :

1. Menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai.
2. Otonomi regional
3. Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain

4. Menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.<sup>17</sup>

Dalam sengketa ini juga ASEAN menyatakan sikap tidak memihak pada pihak manapun termasuk empat negara anggota ASEAN yang ikut terlibat dalam sengketa ini. Berbagai upaya telah dilakukan ASEAN dalam mengurangi ketegangan yang terjadi antara *claimed state* baik dengan dikeluarkannya suatu dokumen dan juga melalui perundingan.

Akhirnya setelah melalui perdebatan – perdebatan panjang, pada tanggal 4 November 2002 Negara – negara ASEAN dan Tiongkok menyepakati sebuah Deklarasi Tata Perilaku Pihak – pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea*) yang ditanda tangani oleh sepuluh Menteri Luar Negeri Negara ASEAN saat Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke – 8 di Kamboja. Adapun isi dari DOC adalah sebagai berikut :

1. Para pihak menegaskan komitmennya terhadap tujuan dan prinsip – prinsip Piagam PBB, UNCLOS, TAC, serta prinsip hukum internasional yang diakui lainnya yang akan dijadikan sebagai norma dasar dalam hubungan antar negara.
2. Para pihak sepakat untuk meningkatkan langkah – langkah untuk membangun saling percaya berdasarkan prinsip – prinsip tersebut diatas dan berdasarkan persamaan serta saling menghormati.
3. Para pihak menegaskan komitmennya atas kebebasan navigasi berdasarkan prinsip –

<sup>15</sup>Direktorat Kerja Sama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, Hal 24.

<sup>16</sup>Usman Manor, *Treaty Amity and Cooperation (TAC); Sebuah Perjanjian Multilateral ASEAN*, Kompasiana, diakses dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) pada 16 Mei 2017 pukul 22.23 wib

<sup>17</sup>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Asean.org

prinsip hukum internasional yang disepakati, termasuk UNCLOS.

4. Para pihak juga sepakat untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yuridiksi di Laut Cina Selatan secara damai, tanpa melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan melalui konsultasi dan negosiasi diantara negara – negara yang berdaulat yang terlibat langsung sesuai dengan prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS.
5. Para pihak sepakat untuk saling menahan diri dari kegiatan – kegiatan yang akan mengakibatkan eskalasi konflik dan akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan termasuk mengentikan pendudukan atas pulau – pulau. Sehubungan dengan penyelesaian konflik secara damai yang tertunda, pihak sepakat untuk mencari cara membangun kepercayaan berdasarkan semangat kerjasama dan saling pengertian, termasuk mengadakan dialog, pertukaran pandangan antara pejabat – pejabat pertahanan dan militer, memperlakukan setiap orang yang berda dalam bahaya maupun kesulitan secara adil dan manusiawi, memberitahukan secara sukarela segala bentuk latihan militer bersama pihak – pihak terkait, melakukan pertukaran informasi secara sukarela mengenai informasi yang relevan.
6. Sebelum terdapat penyelesaian yang menyeluruh dan bersifat tetap atas konflik dimaksud, para pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang saling dilakukan meliputi, perlindungan lingkungan kelautan, penelitian ilmiah kelautan keamanan navigasi dan pelayaran, operasi SAR ( *Search and Rescue* ) dan memerangi kejahatan transnasional termasuk lalu lintas obat – obatan terlarang, bajak laut, perampokan bersenjata, dan penyeludupan senjata.
7. Modalitas, cakupan dan lokasi, serta kerjasama bilateral dan multilateral tersebut akan dirumuskan lebih lanjut sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Para pihak yang terlibat siap untuk melanjutkan dialog dan konsultasi mengenai isu- isu terkait dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bertetangga baik transparansi, harmoni, pengertian bersama dan kerja sama serta memfasilitasi bagi penyelesaian damai di antara mereka.
9. Para pihak sepakat untuk menghormati dan menaati isi dari deklarasi tersebut.
10. Para pihak mengharapkan agar negara – negara dapat menghormati prinsip – prinsip dalam deklarasi tersebut.
11. Para pihak yang bersengketa menegaskan kembali bahwa pengesahan suatu *Code of Conduct* akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di

kawasan, dan disepakati pula untuk melanjutkan proses tercapainya tujuan tersebut.<sup>18</sup>

Pada tahun 2014, sengketa ini semakin tereskalasi dengan peningkatan ketegangan hubungan, terutama antara Vietnam dan Tiongkok. Ini dipicu oleh aksi pengeboran minyak oleh Tiongkok di kepulauan Paracel yang berujung pada tubrukan antar kedua kapal negara tersebut, selain itu pengusiran warga negara Tiongkok yang berada di Vietnam juga gencar terjadi pasca kejadian tersebut.<sup>19</sup>

Indonesia sendiri bukan negara yang mengklaim kepemilikan Laut Cina Selatan, namun turut terpengaruh oleh dinamika sengketa. Hal ini dikarenakan kedekatan geografis Indonesia dengan wilayah sengketa yang mana Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan Pulau Natuna milik Indonesia. Dimana Kepulauan Natuna merupakan salah satu sumber penghasil perikanan dan hasil bumi yang sangat di jaga oleh Indonesia. Selain itu sengketa ini juga mempengaruhi kinerja ASEAN karena empat negara ASEAN terlibat dalam sengketa ini. Kemudian dengan sengketa ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas yang ada di kawasan, dan kepentingan Indonesia dalam penggunaan jalur Laut Cina Selatan.

Sebenarnya ada beberapa kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa tersebut. Kesatu adalah, dari sisi kedaulatan, sebenarnya sebagian wilayah ZEE Indonesia masuk dalam klaim Tiongkok yang berbatasan dengan kepulauan Natuna. Kedua, dari sisi keamanan, jika sengketa tersebut tereskalasi menjadi perang, sangat besar kemungkinan Indonesia juga akan terkena

imbasnya begitu juga dengan ASEAN. Ketiga, jika kita melihat dari sisi ekonomi letak wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan merupakan wilayah penghasil perikanan tangkap terbesar, sehingga timbul asumsi jika pecah perang di wilayah tersebut maka akan mempengaruhi kondisi perikanan di Indonesia.<sup>20</sup>

Selain itu dari sisi sosial budaya, pecahnya perang di Laut Cina Selatan berpotensi menimbulkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke Indonesia. Ini pernah terjadi saat perang Vietnam, sejumlah pengungsi berdatangan ke Pulau Galang.<sup>21</sup> Dengan berbagai potensi ancaman tersebut sudah sewajarnya untuk Indonesia mengambil peran dalam proses penyelesaiannya sengketa Laut Cina Selatan ini.

*First track diplomacy* merupakan jalur diplomasi yang dilakukan oleh sesama kelembagaan negara, atau lebih dikenal dengan diplomasi jalur pertama dan bersifat formal, seperti perundingan dalam forum-forum resmi tingkat regional, dan hasil dari forum ini mengikat secara formal pula. Dalam proses *first track diplomacy* ini Indonesia banyak terlibat aktif dalam melakukan perundingan dengan negara – negara klaim di dalam forum – forum internasional, maupun regional serta bilateral. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai negara non klaim yang ingin ikut andil dalam proses penyelesaian sengketa ini.

Jika melihat proses penyelesaian yang telah dilakukan sejak tercapainya kesepakatan berupa *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea* harapan

<sup>18</sup> ASEAN the Declaration on Conduct Document

<sup>19</sup> Warga Filipina dan Tiongkok Bersatu Protes Tiongkok, ANTARANEWS, Jumat, 16 Mei 2014, diakses dari [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com), pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 22.08 Wib

<sup>20</sup> Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Natuna, DATABOKS, Selasa 16 Agustus 2016. Diakses dari [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id) pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 23.33

<sup>21</sup> *Ibid*

selanjutnya ialah tercapainya *Code of Conduct*. Namun teryata setelah keadaan mulai kondusif Tiongkok dan Vietnam serta Filipina kembali terlibat saling provokasi pada tahun 2011. Pada saat itu Indonesia berinisiatif untuk melakukan *ASEAN Senior Official Meeting* di Surabaya pada tanggal 7 – 11 Juni 2011 yang mana pertemuan ini membahas mengenai garis acuan *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea*.

Selanjutnya Indonesia pada saat mengadakan pertemuan di Bali, memunculkan wacana untuk memperluas *ASEAN Maritime Forum* ( AMF ), sehingga dapat memasukan Tiongkok dan negara – negara lain dalam forum diskusi. Dan wacana itu disahkan saat *the 1<sup>st</sup> Expanded ASEAN Maritime Forum* ( EAMF ) yang diadakan di Manila, Filipina pada Oktober 2012.

Melihat proses diplomasi jalur formal atau *first track* yang kurang efektif dalam menjawab kompleksitas dan dinamika sengketa Laut Cina Selatan yang masih terus berlanjut mendorong munculnya suatu gagasan untuk melakukan diplomasi jalur informal atau *second track* agar dapat membantu menguatkan diplomasi jalur pertama.

Indonesia merupakan negara pertama yang menginisiasikan *second track diplomasi* penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, yakni semenjak tahun 1991 sampai dengan sekarang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun bentuk dari diplomasi informal Indonesia adalah *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* (WMPC – SCS).<sup>22</sup>

WMPC – SCS pertama kali muncul pada tahun 1990 atas prakarsa Prof. Dr. Hasjim Djalal yang merupakan kepala BPPK Kementerian Luar Negeri Indonesia pada saat

itu. Kondisi Laut Cina Selatan yang merupakan wilayah strategis dan memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, memungkinkan adanya kesempatan untuk mengelola potensi konflik yang ada di Laut Cina Selatan menjadi potensi kerjasama. Dengan cara ini Indonesia melalui Prof. Dr. Hasjim Djalal ingin membuat sebuah forum dimana ide – ide penyelesaian sengketa dapat tersalurkan kepada para pembuat kebijakan sehingga berkontribusi secara riil terhadap penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.

Pada perkembangannya WMPC – SCS ini menjadi acara tahunan yang merupakan hasil kolaborasi berkelanjutan antara BPPK Kemenlu, Pusat Studi Asia Tenggara, *South China Sea Informal Working Group* dan *Canadian International Development Agency* (CIDA).

Sebagai workshop pemecah masalah dalam *second track diplomasi*, WMPC – SCS di desain sebagai forum bagi pihak – pihak baik formal maupun tidak formal yang terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan. Workshop ini selain diikuti oleh negara ASEAN juga diikuti oleh Tiongkok dan Taiwan sebagai negara yang ikut bersengketa. Berdasarkan kelompok yang diwakili, WMPC – SCS juga cukup representatif karena mencakup kelompok resmi negara yaitu Kementerian Luar Negeri, Kedutaan, dan institusi pemerintah terkait lainnya serta kelompok tidak resmi non negara yakni akademisi, perusahaan dan media. Para peserta workshop ini diminta untuk langsung mengkomunikasikan kesepakatan tersebut pada instansi terkait sehingga diharapkan dapat terjalin koordinasi yang baik antara hasil yang dicapai di *second track diplomasi* dan kontribusinya pada *first track diplomasi*.

WMPC – SCS sendiri memiliki Visi yaitu untuk menjadi forum dialog dan pertukaran pandangan pihak – pihak yang

---

<sup>22</sup>BPPK Kemenlu, *Op, Cit hal* 66

bersengketa, mengembangkan *confidence – building measures* (CBMs), dan mengembangkan usaha – usaha kerjasama yang dapat membantu transformasi konflik menjadi kerja sama kawasan.<sup>23</sup> Pada perkembangannya WMPC – SCS memiliki tahapan – tahapan workshop *second track diplomacy* yaitu intelejen, desain, pilihan dan transfer.

Kemudian format workshop dibagi menjadi tiga elemen yakni, proses workshop itu sendiri sebagai forum dialog untuk mengembangkan CBMs, *Technical Working Groups* (TWGs) sebagai tim pelaksana implementasi kerja sama teknis yang disepakati, dan *Group of expert Meeting* (GEMs) yang bekerja untuk mendukung TWGs dalam perancangan, implementasi dan pengawasan kerja sama. Adapun bidang – bidang yang berhasil disepakati terdiri dari lima area yaitu, riset ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, keamanan pelayaran, manajemen sumber daya alam, dan isu – isu legal. Pada pertemuan terakhir di Jakarta telah juga disepakati untuk tetap melanjutkan kerjasama yang telah dijalankan pada tahun – tahun sebelumnya.

## SIMPULAN

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu sengketa yang sangat rumit penyelesaiannya dan sudah berlangsung sangat lama. Sukarnya proses penyelesaian sengketa ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya negara yang terlibat dalam sengketa ini. Keterlibatan Tiongkok sebagai negara adidaya menjadikan sengketa ini terkesan bertambah rumit hal ini dikarenakan ketidak samaan kekuatan yang dimiliki yang menjadikan Tiongkok seperti tidak

menghormati atau terkesan membuat aturan main sendiri.

Kemudian karena beberapa negara ASEAN terlibat dalam sengketa ini, hal ini menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara – negara ASEAN sedikit susah untuk menjadi mediator, ini disebabkan oleh negara – negara ASEAN itu sendiri yang tidak bisa menyatukan pendapat sehingga mempersulit proses negosiasi.

Indonesia memang bukan merupakan negara klaim, namun Indonesia memiliki kepentingan terhadap tercapainya solusi sengketa Laut Cina Selatan. Pertama, sengketa yang berlarut – larut dapat mengganggu kestabilan kawasan baik karena benturan – benturan yang sering muncul, hubungan yang tidak harmonis antara negara – negara di kawasan, dan terhambatnya eksplorasi sumber daya alam dan aktifitas ekonomi lain sebagai dampak dari sengketa ini. Terganggunya stabilitas kawasan ini pada akhirnya juga berdampak negatif bagi Indonesia yang berada di kawasan yang sama, selain itu jika dibiarkan berlarut – larut dikhawatirkan eskalasi konflik akan terus meningkat. Klaim Tiongkok ini juga dianggap sebagai suatu ancaman bagi kedaulatan Indonesia jika terus dibiarkan karena wilayah Indonesia yakni Kepulauan Natuna merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, dan pernah di usik oleh Tiongkok lewat sembilan garis putus – putus yang diterbitkan Tiongkok.

Penyelesaian berkelanjutan dari sengketa Laut Cina Selatan tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan di dua level, yaitu pada level *first track diplomacy* dan *second track diplomacy*. Pada level pertama upaya penyelesaian sengketa terbagi atas dua level yakni bilateral antara negara – negara yang bersengketa, dan regional antara

---

<sup>23</sup>The 14<sup>th</sup> Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea, Batam, 24 – 26 November 2004, Jakarta: BPPK Kemenlu, hal 2

negara – negara ASEAN dan Tiongkok. Kemudian pada level kedua penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam bentuk Workshop yang dinamai *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* (WMPC – SCS), workshop ini merupakan salah satu mekanisme yang paling konsisten diadakan setiap tahunnya dan merupakan inisiasi dari Indonesia.

Pada level *first track diplomacy* Indonesia telah berkontribusi aktif dalam kasus sengketa ini dengan cara mendorong penyelesaian *code of conduct* dan menghormati *declaration code of conduct* ini selalu disuarakan oleh Indonesia dalam setiap pertemuan, baik di tingkat regional maupun Internasional. Selain itu Indonesia juga bersedia menjadi *honest broker* bagi penyelesaian sengketa ini.

Pada level *second track diplomacy* Indonesia juga telah berinisiatif melakukan workshop yang telah rutin dilakukan sejak tahun 1990 lalu sampai sekarang. Dalam workshop ini juga telah dilahirkan beberapa kerjasama – kerjasama seperti pendataan perikanan yang ada di Laut Cina Selatan dan keamanan pelayaran yang telah dilaksanakan oleh negara yang bersengketa.

Pada akhirnya upaya – upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah langkah pencegahan agar potensi sengketa ini tidak bereskalasi menjadi konflik terbuka yang akan mengganggu stabilitas kawasan dan tentunya mengganggu kepentingan Indonesia sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Akmal. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut Cina Selatan pada Tahun 2009 – 2014 dalam Jurnal FISIP Vol 2 tahun 2015.

Ariffien, Nurul Fitri Zainia, Upaya Diplomati Indonesia Terhadap China dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut Cina Selatan. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2 (3): 831-842. 2014, <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id>. (diakses 15 Januari 2017 pukul 22.07 wib)

ASEAN Studies Centre, *ASEAN Focus: Special Issue on South China Sea Arbitration Responses and Implications.* Singapore: ASEAN Studies Centre, 2016. Diakses dari <https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ASEANFocusSouthChinaSeaArbitration.pdf>, pada 11 April 2017, pukul 22.08 wib

Farhana, Faudzan, Memahami Perspektif Tiongkok dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan. *Jurnal Pendidikan Politik*, Vol 11, No 1: 167. 2014-180. <http://ejournal.lipi.go.id>. (diakses 15 Januari 2017 pukul 23.33 wib)

Fahrudin, Wawan. Sekuritisasi Maritim dan Wilayah Perbatasan dalam *Jurnal Institute for Global Justice* edisi Maret (diakses 17 Januari 2017 pukul 10.33 wib)

I Nyoman Sudira, *Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa.* *Journal Unpar.* 2014 Diakses dari [www.journalunpar.ac.id](http://www.journalunpar.ac.id) pada 12 Mei 2017, pukul 21.23 wib

Raharjo, Sandi Nur Ikfal, Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11, No 2: 55-70. 2014, <http://ejournal.lipi.go.id>. (diakses 15 Januari 2017 pukul 23.12 wib)

Tri Nuke Pudjiastuti dan Pandu Prayoga, *ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi KONflik Menuju Tata*

- Kelola Keamanan Regional Asia Timur. Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2015, diakses dari [www.ejournal.lipi.go.id](http://www.ejournal.lipi.go.id) pada 12 Mei 2017, pukul 22.12 wib
- Saeri M, Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka, Jurnal Transnasional, Vol 4, No 2. 2013,
- Yessi Olivia, Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. Jurnal Transnasional, Vol 5, No 1, Juli 2013 dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=138968&val=2274&title=level%20Analisis%20dan%20Teori%20hubungan%20Internasional>. Diakses pada 11 Februari 2017 pukul 23.09
- Buku**
- A.R Soetopo, 1991 Hubungan Internasional Kawasan: Indonesia di Kawasan Asia Pasifik. Jakarta: CSIS.
- BPPK KMENLU – Pusat Studi Sosial Asian Tenggara, 2015, Indonesia dan Second Track Diplomacy Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan : Evaluasi Peran dan Langkah Kedepan. Jakarta: Perpustakaan Deplu.
- Dam Syamsumar, 2010 Politik Kelautan, Jakarta : Bumi Aksara
- Djalal, Hasyim. 1995 ” Spratly Dispute and the Need for Democratic Settlement.” Dalam *Indonesian and the Law of the Sea*, by Hasjim Djalal. Jakarta: CSIS,
- Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN, 2013. ASEAN Selayang Pandang. Ed 23. Jakarta: Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia
- Mas’oed Mochtar, 1990 Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Jakson, Robert dan Sorensen, Georg. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jemadu Aleksius, 2006 Politik Global dalam Teori dan Praktik. Bandung : Graha Ilmu.
- Leifer, Michael. 1999 ” Stalemate in the South China Sea.” Dalam Knut Sidal, ed, Perspectives on the conflicts in the South China Sea.
- Rizki Ruza, Poltak Partogi Nainggolan dan Simela Victor Muhamad. 2013 Konflik laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan. Jakarta : P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Roy, S.L, 1991 Diplomasi. Jakarta : CV. Rajawali.
- Ras, Abdul Rivai. 2001 Konflik Laut Cina Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik Sudut Pandang Indonesia. Jakarta: Yayasan Abdi Persada Siporenu Indonesia, Spers Mabes TNI AL.
- Sorensen George dan Jackson Robert, 1999 Introduction to International Relations. New York : Oxford University Press Inc
- The ASEAN Secretariat, 2014, ASEAN Statistical Yearbook. Jakarta: ASEAN
- Varma, SP. 2010 ” Teori Politik Modern”. Jakarta: Rajawali Press
- Internet**
- Analisis Kasus Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Prosedur Diplomatik, <https://indraprasetyalaw.wordpress.com/2016/10/30/analisis-kasus-peran-indonesia-dalam-penyelesaian-sengketa-internasional-melalui-prosedur->

diplomati/, diakses pada 11 Januari 2017, pukul 22.21 wib

Indonesia di Laut Cina Selatan Berjalan Sendiri.  
<https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesia-laut-cina-selatan-berjalan-sendiri>, diakses pada 11 Januari 2017, Pukul 22.12

Joint Communique for the 25<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting. Diakses dari <http://www.aseansec.org/1167.htm>. Pada 1 Juni 2017, pukul 00.43 wib

Joint Communique for the 33<sup>rd</sup> ASEAN Ministerial Meeting. Diakses dari <http://www.aseansec.org/3659.htm>. Pada 1 Juni 2017, pukul 00.55 wib

Konflik Laut China Selatan, Jadi Tantangan Diplomasi Indonesia,  
<http://www.kabarnusa.com/2016/11/konflik-laut-china-selatan-jadi.html>, diakses pada 22 Januari 2016, Pukul 14.33 wib

Manuver Politik Cina dalam Konflik Cina Selatan, diakses dari <http://idu.ac.id>, pada 1 Juni 2017, Pukul 23.55 wib

Pengaruh Keamanan Regional Bagi Keamanan Nasional Indonesia (Kasus Sengketa Laut Cina Selatan),  
<https://budisusilosoepandji.com/2012/05/23/pengaruh-keamanan-regional-bagi-keamanan-nasional-indonesia-kasus-sengketa-laut-cina-selatan/>diakses pada, 5 Januari 2017 Pukul 21.08 wib

Sengketa kepemilikan Laut Cina Selatan, diakses dari [www.bbconline.com](http://www.bbconline.com), pada 2 Juni 2017, pukul 00.22 wib

Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna,  
[http://www.Cnn.Indonesia.com/2016/06/28/ Staf\\_Ahli\\_Luhut:\\_Jika\\_Dibiarkan,\\_China\\_Kuasai\\_Laut](http://www.Cnn.Indonesia.com/2016/06/28/ Staf_Ahli_Luhut:_Jika_Dibiarkan,_China_Kuasai_Laut)

Natuna/diakses pada 5 Januari pukul 21.22 wib

Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Natuna, DATABOKS, Selasa 16 Agustus 2016.  
[www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id) pada tanggal 1 Juni 2017, pukul 23.33 wib